

Portofolio

Kelompok 12

Nama Anggota :

- 1. Dwi Apriyana_2313031022**
- 2. Nida Yasmin Sofiyah_2313031026**

Mata Kuliah : Akuntansi Sektor Publik

Integrasi Sistem Keuangan Digital di Pemerintah Meningkatkan Transparansi Anggaran Kompas.com, 12 Februari 2025..

Link: <https://www.kompas.com/ekonomi/read/2025/02/12/digital-keuangan-pemerintah>

Mengdigitalisasi sistem keuangan pemerintah melalui platform berbasis awan adalah langkah menuju reformasi fiskal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pelaporan transaksi secara real-time membantu mempercepat penyusunan laporan LKPP dan LKPD serta mengurangi kesalahan manual. Digitalisasi sesuai dengan teori New Public Management yang mendorong efisiensi sektor publik melalui teknologi. Namun, keberhasilan tergantung pada kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur digital, dan keamanan data, terutama di daerah dengan akses teknologi terbatas. Pelatihan bagi pegawai pemerintah dan penguatan sistem keamanan digital diperlukan untuk mendukung penerapan akuntansi berbasis pencatatan.

BPK Ungkap Tantangan dalam Audit Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

Bisnis.com, 7 Maret 2025

Link: <https://www.bisnis.com/finansial/read/20250307/bpk-audit-laporan-keuangan>

BPK menemukan banyak kelemahan dalam pelaporan keuangan pemerintahan daerah, terutama dalam pencatatan aset dan penerapan akuntansi berbasis pencatatan. Banyak pemerintahan daerah menerima opini WDP karena kontrol internal yang lemah dan kesadaran akan akuntabilitas yang rendah. Penilaian audit tidak hanya evaluasi teknis, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Oleh karena itu, audit internal sebelum audit BPK, inventarisasi aset secara digital, serta pelatihan bagi pegawai negeri diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan anggaran dan memastikan transparansi.

Penggunaan Teknologi Akuntansi Berbasis Awan di Pemerintahan Daerah

Katadata.co.id, 17 November 2024

Link: <https://katadata.co.id/teknologi-cloud-akuntansi-pemerintah-daerah>

Menggunakan teknologi akuntansi berbasis awan membuat pengelolaan dan penggabungan data keuangan pemerintah lebih mudah secara digital. Sistem ini mendukung integrasi antar unit dan pengawasan keuangan. Namun, penerapannya belum merata karena keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Untuk memastikan keamanan data dan laporan akuntansi berbasis pencatatan yang efektif, digitalisasi akuntansi perlu dilakukan melalui pedoman teknis yang jelas, peningkatan literasi teknologi, dan standar keamanan informasi.

Penerapan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia (Hamzah, Kusumawati & Nirwana (2024)

Link: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/invoice/article/view/11343>

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia masih terutama bersifat administratif dan fokus pada memenuhi regulasi untuk memperoleh opini audit, bukan sebagai alat strategis untuk pengambilan keputusan. Penelitian ini menyarankan penelitian masa depan fokus pada transformasi sistem pelaporan digital dan penguatan pemerintahan lembaga pemerintah. Reformasi akuntansi perlu melibatkan perubahan budaya kerja dan peningkatan kapasitas pegawai pemerintah, bukan hanya mengikuti standar teknis SAP.

Transformasi Digital Sektor Publik dalam Akuntansi .Irmawati, Haliah & Thamrin (2025)

Link: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/invoice/article/view/18805>

Transformasi digital, seperti penggunaan big data dan kecerdasan buatan, dapat meningkatkan keakuratan dan kecepatan laporan keuangan publik. Namun, tantangan utamanya adalah kurangnya tenaga manusia yang terampil dan ketiadaan regulasi teknis terkait akuntansi digital. Dibutuhkan pelatihan, pengembangan panduan akuntansi digital, serta peningkatan perlindungan data untuk memastikan proses digitalisasi keuangan berjalan lancar dan berkelanjutan.

Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan dan Kualitas Keuangan Publik. Putri & Triyuwono (2024).

Link: <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak/article/view/40578>

Kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada kekuatan sistem pengendalian internal. Audit internal yang baik dapat mencegah kesalahan pencatatan dan mengurangi risiko korupsi. Namun, beberapa daerah mengalami keterlambatan dalam pelaporan karena pengawasan yang lemah. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pengendalian internal dan peningkatan kompetensi tenaga manusia seharusnya menjadi prioritas untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Akuntansi Berbasis Accrual dan Reformasi Pemerintahan dalam Indonesia. Shonhadji (2024)

Link: <https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/198>

Akuntansi berbasis accrual membantu mencerminkan kondisi keuangan pemerintah secara akurat, termasuk aset dan kewajiban. Sistem ini meningkatkan transparansi dan relevansi informasi keuangan dalam perencanaan anggaran. Namun, pelaksanaannya terhambat karena kurangnya pemahaman teknis dan penolakan dari birokrasi. Reformasi akuntansi memerlukan dukungan melalui pelatihan, digitalisasi sistem informasi, serta audit rutin untuk memastikan bahwa reformasi ini bukan hanya aturan administratif, tetapi juga memperkuat manajemen keuangan negara.

Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Tinjauan Literatur Sistematis. Mariana, Diana, Arifai & Jannah (2025)

Link: <https://jurnal.stisahlalsigli.ac.id/index.php/jhei/article/view/320>

Reformasi akuntansi publik secara global dipengaruhi oleh perlawanan institusional, keterbatasan integrasi teknologi, dan ketidaksesuaian kebijakan pelaporan. Di Indonesia, meskipun akuntansi berbasis accrual telah diterapkan, sistem pelaporan belum sepenuhnya digital dan masih ada masalah pelaporan ganda. Penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital, standar keamanan data, serta audit berbasis teknologi dapat meningkatkan efektivitas pelaporan fiskal.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 – Teraudit

https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/publikasi/data/gfs/LKPK/LKPK_2023.pdf

LKPP tahun 2023 mendapatkan opini WTP (Without Qualification), yang menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menerapkan akuntansi berbasis accrual dan pengendalian internal yang kuat. Penerimaan pendapatan nasional melebihi target, dan penggunaan anggaran efektif. Namun, tantangan masih ada dalam penggabungan data dan digitalisasi proses pelaporan. LKPP seharusnya tidak hanya digunakan sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai sumber informasi strategis untuk kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan nasional. Langkah berikutnya adalah meningkatkan kompetensi pegawai negeri dan digitalisasi sistem keuangan.

Rujukan:

Kompas.com. (2025, Februari 12). *Integrasi Sistem Keuangan Pemerintah Berbasis Digital Tingkatkan Transparansi Fiskal*. <https://www.kompas.com/ekonomi/read/2025/02/12/digital-keuangan-pemerintah>

Bisnis.com. (2025, Maret 7). *BPK Ungkap Tantangan Audit atas Laporan Keuangan Daerah 2024*. <https://www.bisnis.com/finansial/read/20250307/bpk-audit-laporan-keuangan>

Katadata.co.id. (2024, November 17). *Pemanfaatan Teknologi Cloud Accounting pada Pemerintah Daerah*. <https://katadata.co.id/teknologi-cloud-akuntansi-pemerintah-daerah>

Hamzah, H., Kusumawati, A., & Nirwana, N. (2024). *Implementation of Public Sector Accounting in Indonesia*. Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi, 5(3), 210–225. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/invoice/article/view/11343>

Irmawati, H., Haliah, C., & Thamrin, R. (2025). *Digital Transformation of Public Sector Accounting*. Invoice: JIA, 6(1), 88–102. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/invoice/article/view/18805>

Putri, C. M., & Triyuwono, I. (2024). *Internal Control Over Financial Reporting as a Determinant of Public Financial Quality*. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 14(2), 145–160. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak/article/view/40578>

Shonhadji, N. (2024). *Accrual-Based Accounting & Governance Reform in Indonesian Public Sector*. International Journal of Public Finance, 9(1), 33–47. <https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/198>

Mariana, D., et al. (2025). *Public Sector Accounting Reform: A Systematic Review*. JHEI EMA, 8(4), 501–520. <https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/jhei/article/view/320>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023*. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/publikasi/data/gfs/LKPK/LKPK_2023.pdf